



Duo Art Center Segera Masuk Bui

KASUS korupsi art center dengan dua terdakwa sudah divonis hakim. Dan kemarin memasuki babak baru, lantaran terdakwa Mantan Kadis Kebudayaan Ketut Suastika dan Kepala UPT Taman Budaya atau Art Center Mantara Gandhi menyatakan menerima vonis hakim. Tak hanya itu, Jaksa juga mengatakan menerima. Atas kondisi ini kasus korupsi art center *Inkracht van gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap). Sehingga duo Art Center tersebut akan segera masuk kerangkeng.

Pengacara terdakwa Ketut Ngastawa mengatakan, kedua terdakwa menerima vonis hakim tersebut. "Kami pastikan kedua terdakwa menerima vonis hakim tersebut. Kami tidak melakukan banding, artinya jika Jaksa juga menerima kasus ini *Inkracht van gewijsde*," ungkapnya.

Dia mengatakan, dengan kondisi ini kedua terdakwa sudah menjadi terpidana dan bisa dilakukan proses eksekusi untuk menjalani hukuman. "Pada intinya klien kami siap menjalani hukuman, sesuai dengan vonis hakim," ungkapnya.

Dikonfirmasikan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Made Tangkas, memastikan bahwa Jaksa juga menerima. "Artinya kasus ini sudah *Inkracht* sudah bisa dieksekusi," ungkapnya.

Kapan masuk kerangkeng? Dia mengatakan setelah kedua pihak menerima, yaitu dirinya selaku Jaksa dan terdakwa. Pihaknya mengaku akan meminta salinan putusan ke PN Denpasar. Jika memang sudah turun salinan putusan, baru akan dilakukan pemanggilan untuk nanti eksekusi atau masuk penjara. "Kalau kami panggil tidak datang, baru jemput paksa," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan yang mengatakan bahwa kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap dan bisa dieksekusi. "Tinggal menunggu salinan putusan, yang akan menjadi dasar dilakukan penahanan sesuai dengan vonis hakim," imbuhnya. Karena sudah menjalani tahanan Kota, nanti akan dihitung 1 per lima. Artinya berapa lama sudah menjalani tahanan Kota, akan terhitung sudah menjalani tahanan penjara satu per lima dari tahanan Kota. Seperti diberita sebelumnya, terdakwa Suastika divonis 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan dan Mantara Gandhi divonis lebih rendah yaitu 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan.

Dalam vonis hakim disampaikan bahwa terdakwa terbukti bersalah, melanggar pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya Hakim memvonis Suastika dengan hukuman 1 tahun 2 bulan, dengan denda Rp 100 juta subsidi 2 bulan. Artinya jika tidak membayar denda hukumannya bertambah 2 bulan. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. Sedangkan dendanya sama Rp 100 juta, namun subsidiernya dalam tuntutan 6 bulan.

Sedangkan untuk Mantara Gandhi hakim memvonis 1 tahun 1 bulan atau 13 bulan. Dengan denda Rp 50 juta subsidi 1 bulan. Jika tidak membayar denda bertambah 1 bulan hukumannya. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa, yaitu dituntut 1,5 tahun dan Rp 50 juta subsidi 3 bulan. Dua terdakwa sebelumnya sudah mengembalikan kerugian negara. (art/han)

Edisi : Selasa, 24 Maret 2015

Hal : 24



Evaluasi Bagi Dana PHR

Menyeruak

Dewan Badung Usul Dialihkan ke Hal Lain

MANGUPURA - Penggunaan dana penyisihan Pajak Hotel Dan Restoran (PHR) dari Kabupaten Badung ke enam kabupaten diduga kuat tidak tepat sasaran terus mendapat sorotan dewan. Bahkan, muncul usulan evaluasi dana PHR yang jumlahn-

ya mencapai Rp 200 miliar lebih itu. Usul melakukan evaluasi ini disuarakan Sekretaris Komisi III DPRD Badung Ketut Subagia.

Politisi Demokrat ini mengatakan, jika dana itu distop dan dialihkan ke hal lain, maka pembangunan di Badung bisa lebih kencang. Misalnya dialihkan untuk membangun sekolah dan rumah sakit. Dengan dana itu, Pemkab badung bisa lebih leluasa membangun

infrastruktur. " Dana yang mencapai Rp 200 miliar lebih itu bisa dipakai untuk pembangunan puluhan sekolah dan rumah sakit internasional di Kabupaten Badung," ungkap Subagia didampingi ketua Komisi III Nyoman Satria, kemarin (23/3).

Ditambahkan Subagia, meski penyaluran dana PHR difasilitasi oleh Pemprov Bali, namun Pemkab Badung tetap wajib mengetahui. Pasalnya, dana tersebut didapat

dari penyisihan pajak yang ada di Badung. Pihaknya pun menuntut transparansi enam kabupaten (Jembrana, Tabanan, Buleleng, Karangasem, Bangli dan Klungkung). "Jangan sampai dana itu melenceng dari kesepakatan awal pembangunan infrastruktur pariwisata," sodoknya.

Sementara itu, Pemkab Badung sendiri tidak bisa berbuat banyak terkait persoalan tersebut. Badung hanya bisa memberikan imbauan

kepada sejumlah kabupaten yang menggunakan dana tersebut. Kabag Humas dan Protokol Setkab Badung Anak Agung Gede Raka Yuda mengungkapkan, untuk masalah pengawasan berada pada wewenang Pemerintah Provinsi Bali. "Kami minta agar enam kabupaten yang memperoleh dana penyisihan PHR Badung bisa memanfaatkannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat," ujar Gung Raka singkat. **(san/han)**

Edisi : selasa, 24 Maret 2015

Hal : 24

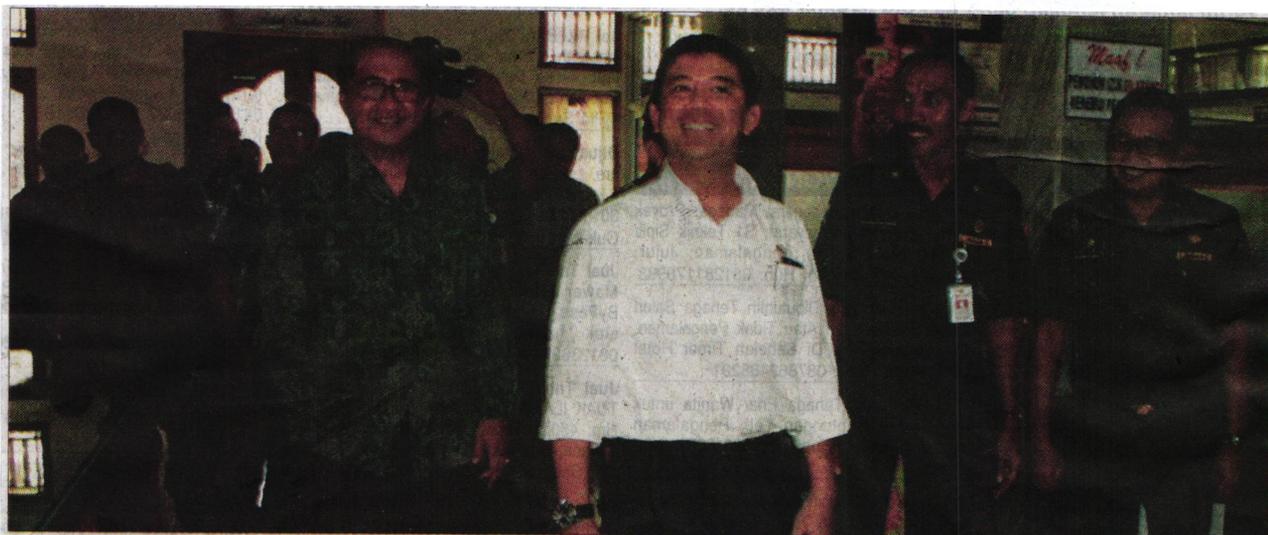


Radar Bali

Men-PAN RB Persilakan Tambah CPNS Guru

GIANYAR - Banyaknya keluhan beberapa daerah di Bali, termasuk Gianyar yang kekurangan hingga ratusan guru mendapat respons Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Yuddy Chrisnandi. Saat menyambangi Gianyar siang kemarin (23/3), Menpan RB mempersilakan ke masing-masing pemerintah daerah untuk mengajukan penambahan jumlah formasi CPNS untuk guru.

"Begini, sekalipun ada moratorium (CPNS). Khusus untuk guru, medis, dan penyuluh pertanian itu tetap diutamakan. Jadi kalau ada daerah yang masih kekur-



NYOMAN WIDIADNYANA/ RADAR BALI

BERTAHAP REKRUT GURU: Men-PAN RB Yuddy Chrisnandi (depan) saat berkunjung ke Kantor BPPT Gianyar, kemarin.

gan, silakan diajukan. Kami akan memperjuangkan," katanya di hadapan awak media di Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Pemkab Gianyar.

Tapi menteri yang juga politisi Partai Hanura ini mengingatkan, jika pe-

memenuhan guru melalui CPNS itu jelas tidak bisa dilakukan sekaligus. Namun harus bertahap. Sebab pemenuhan itu juga harus didasarkan pada kemampuan anggaran masing-masing daerah. "Cuma itu tadi, tidak mungkin

semuanya dipenuhi sekaligus, tapi harus bertahap. Sebab pemenuhan itu juga mencakup kemampuan anggaran yang dimiliki masing-masing daerah. Hal itu juga menjadi perhitungan kami," tambahnya. (wid/djo)

Edisi : Selasa, 24 Maret 2015

Hal : 26



PASAR SANGSIT



EKA PRASETYA/ RADAR BALI

TUNTUT HAK: Pedagang Pasar Sangsit di DPRD Buleleng, kemarin.

Tagih Aset, Pedagang Lurug Wakil Rakyat

SINGARAJA - Puluhan pedagang di Pasar Sangsit, *ngelurug* Gedung DPRD Buleleng, Senin siang kemarin (23/3). Mereka mendesak pengembalian aset Pasar Sangsit yang selama ini dikelola Pemkab Buleleng melalui Perusahaan Daerah Pasar Buleleng, kepada Desa Pakraman Sangsit Dauh Yeh.

Tak kurang dari 30 orang pedagang yang biasa berjualan di Pasar Sangsit, mendatangi gedung Dewan. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Buleleng I Made Adhi Purnawijaya dan Ketua Komisi III DPRD Buleleng Putri Nareni. Dalam pertemuan juga hadir Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagrin) Buleleng Ni Made Arnika, serta Dirut PD Pasar Buleleng I Putu Gede Satwika Yadnya.

Dalam pertemuan tersebut, pedagang banyak mengeluhkan masalah yang terjadi di Pasar Sangsit. Mulai dari pemangkasan luas los pasca direvitalisasi pada 2013, masalah keamanan, serta dugaan pungutan liar yang diduga dilakukan oknum pengurus Unit Pasar Sangsit. Pedagang menganggap pengelolaan Pasar Sangsit, tak seperti yang diharapkan. Sehingga mereka mendesak pasar dikembalikan pengelolaannya kepada Desa Pakraman Sangsit Dauh Yeh.

Mereka juga menilai, desa pakraman membutuhkan dana yang cukup besar, guna membiayai upacara dan upacara terhadap pura-pura yang ada di wilayah Sangsit Dauh Yeh. Sehingga laba yang dihasilkan melalui pengelolaan pasar, diharapkan bisa meringankan beban desa pakraman dan *krama* desa. "Intinya kami ingin Pasar Sangsit dikembalikan pengelolaannya kepada desa pakraman. Kami tidak mau kalau pasar ini dikelola PD Pasar, apalagi kalau asetnya diserahkan kepada PD Pasar," kata Gede Budi Setiawan, Ketua Persatuan Pedagang Pasar Sangsit. Dirut PD Pasar Buleleng I Putu Gede Satwika Yadnya mengaku tak masalah jika akhirnya pengelolaan Pasar Sangsit dikembalikan kepada Desa Pakraman.

Wakil Ketua DPRD Buleleng I Made Adhi Purnawijaya mengaku akan segera menengahi masalah tersebut, dan mencari jalan keluar bersama Pemkab Buleleng. Dalam pertemuan kemarin, Dewan hanya mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh pedagang. (eps/djo)

Edisi : Sakasa, 24 Maret 2015
Hal : 29



Radar Bali

PERTAMBANGAN PETANG

Dewan Usul Zonasi, Camat Minta Buka Lahan

SETELAH membahas masalah sempadan pantai di tiga kecamatan, yakni Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan, pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DPRD Badung membahas kondisi wilayah kecamatan Petang. Penataan wilayah paling utara Badung ini difokuskan pada pertambangan pembukaan lahan galian C. Terutama lahan berbukit. Selama ini, pertambangan di Petang memang marak. Namun, sebagian besar pertambangan tersebut tidak memiliki izin alias bodong.

Akibat pertambangan tak berizin itu, beberapa kali terjadi longsor dan menelan korban jiwa saat hujan lebat. Koordinator Pansus RDTR Badung, mengungkapkan masyarakat cukup banyak membuka pertambangan tak berizin. Sehingga perlu ditata dan pengaturan zonasi dalam RDTR. "Kami mengusulkan tidak dibuka secara keseluruhan untuk pertambangan. Tapi diatur di dua desa yakni Petang dan Sulangai," ungkap Ketut Suiasa kemarin (23/3).

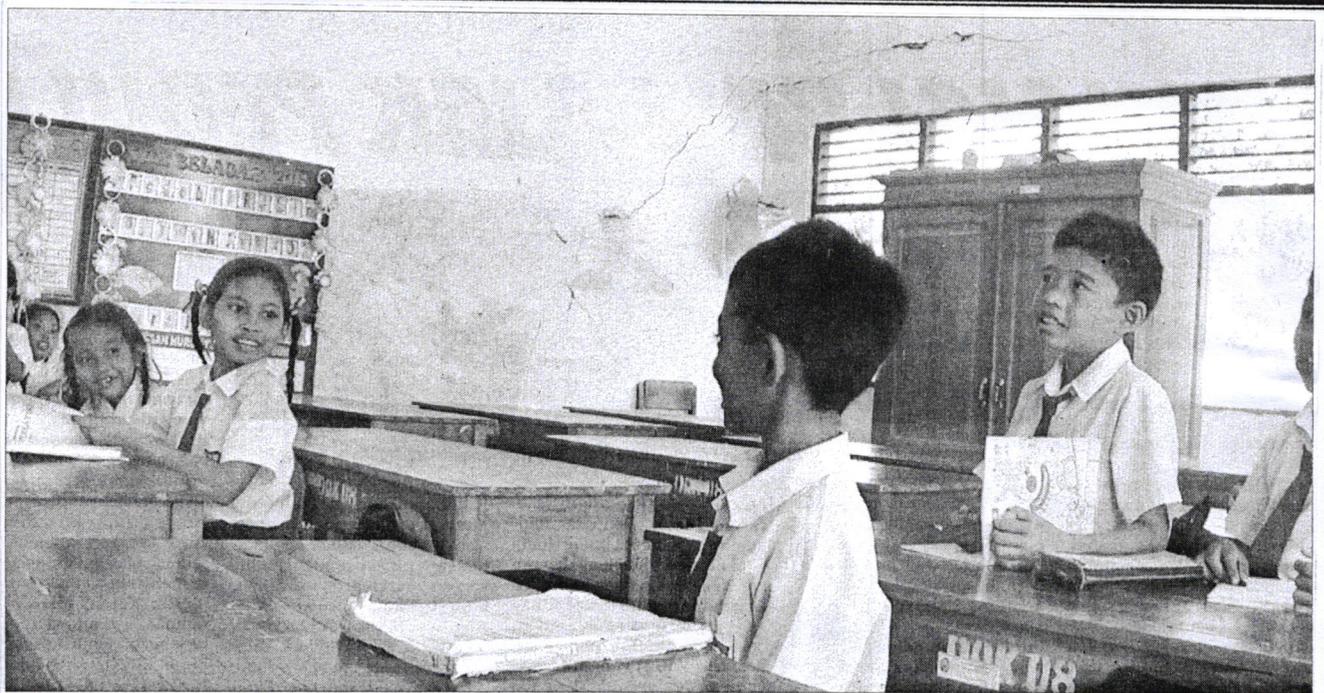
Ditegaskan Suiasa, penataan kawasan pertambangan juga mesti dikaji secara teknis. Menurutnya, penambahan atau pembukaan lahan pertambangan harus ada kajian teknis, minimal peraturan bupati (Perbup). "Harus ada kajian teknisnya biar semuanya jelas," tukas politisi asal Pecatu itu.

Sementara itu, Camat Petang I Gusti Ariawan mengusulkan dua bukit di kawasan Desa Sulangai bisa di masukan zona pertambangan. Menurut Ariawan, saat ini bukit itu tidak bisa digunakan karena kondisi bukit terlalu curam dan tidak bisa ditanami hasil perkebunan "Kawasan ini kami usulkan agar bisa dilakukan penataan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat," kata Ariawan.

Selain pertambangan, pihaknya juga mengusulkan agro industri skala kecil juga dirancang. Tujuannya untuk memproteksi hasil produksi pertanian masyarakat di Petang. (san/han)

Edisi : Sabtu 24 Maret 2015

Hal : 24



CERIA, TAPI WASWAS: Dinding SDN 4 Desa Pohsanten, Mendoyo, Jembrana, ini yang retak-retak jika tak segera diperbaiki, bisa menelan korban. Termasuk, para siswa ini.

SDN 4 Pohsanten Nyaris Ambruk

Jika Turun Hujan, Ruang Kelasnya Bocor

NEGARA - Pembangunan fasilitas pendidikan di Jembrana masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Seperti terlihat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo. Sebab, selama 3 tahun terakhir, para siswa di ruang kelas yang sebagian besar rusak dan mengancam keselamatan siswa.

Sekolah SDN 4 Pohsanten kondisinya terlihat sudah tidak layak menjadi tempat belajar mengajar. Hampir semua ruang kelas rusak parah, tembok sudah banyak yang retak dan atap plafon sudah hampir jebol.

Selain bagian plafon rusak

dan hampir jebol, jika musim hujan ruang kelas juga banyak yang bocor. Menurut sejumlah siswa, proses belajar mengajar sering terganggu karena air mengucur deras dari atas.

Bahaya Mengintai Siswa SD di Jembrana

1. Gedung SDN 4 Desa Pohsanten, Mendoyo, rusak 3 tahun.
2. Hampir semua ruang kelas rusak parah, tembok retak dan atap plafon SDN 4 Pohsanten ini hampir jebol.
3. Jika musim hujan ruang kelas juga banyak bocor. Sejumlah siswa terganggu air mengucur deras dari atas.
4. Selain SDN 4 Pohsanten, SDN 1 Pohsanten atapnya hancur dan berlubang. Ruang penyekat antar kelas dari triplek. Beberapa bagian berlubang.
5. Ketua DPRD Jembrana | Ketut Sugiasa berharap komite sekolah segera mengusulkan ke dinas agar segera diperbaiki sebelum memakan korban jiwa siswa atau guru.



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Kondisi ini tentunya mengganggu proses belajar mengajar dan sangat membahayakan keselamatan siswa.

Selain SDN 4 Pohsanten, kondisi serupa juga terlihat

Edisi : selasa, 24 Maret 2015

Hal : 29



Radar Bali

Sambungan



Karena ini sudah tidak layak lagi, dan itu harus segera diperbaiki. Komite cepat kejar ke dinas agar segera dimulai perbaikan. Jangan sampai anak-anak jadi korban.”

I KETUT SUGIASA

Ketua DPRD Jembrana

di SDN 1 Pohsanten. Atap sekolah ini sudah banyak yang hancur dan berlubang. Ruang penyekat antar kelas juga hanya terbuat dari triplek, kondisinya juga sudah memprihatinkan.

Beberapa bagian sudah berlubang sehingga mengganggu konsentrasi belajar siswa.

Menurut informasi, kondisi ini sudah berlangsung sekitar 3 tahun lalu, namun tidak kunjung diperbaiki. Pihak sekolah, siswa dan wali murid berharap sekolah segera diperbaiki agar tidak mengganggu konsentrasi belajar mengajar.

Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa saat berkunjung ke sekolah mengatakan, kondisi sekolah sudah tidak layak dan membahayakan siswa. Dia berharap komite sekolah segera mengusulkan ke dinas agar segera diperbaiki sebelum memakan korban jiwa siswa atau guru. "Karena ini sudah tidak layak lagi, dan itu harus segera diperbaiki. Komite cepat kejar ke dinas agar segera dimulai perbaikan. Jangan sampai anak-anak jadi korban," desaknya. (bas/djo)